



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7973-7982

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian Menggunakan Pendekatan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di Kabupaten Konawe Selatan

Jufiati Laloi<sup>1✉</sup>, Saediman<sup>2</sup>, Yusna Indarsyih<sup>3</sup>

Agribisnis, Universitas Halu Oleo

Email: [jufiatilaloi@gmail.com](mailto:jufiatilaloi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi petani mengenai asuransi pertanian. Kepercayaan petani terhadap lahan padi yang belum tentu mengalami gagal panen Petani akhirnya menjadi enggan untuk membayar premi. Alasan-alasan tersebut menjadi penghambat petani untuk berpartisipasi dalam program asuransi pertanian. Tujuan penelitian (1) Untuk mengidentifikasi kriteria dan alternatif strategi dalam pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan. (2) Mengetahui prioritas alternatif strategi yang perlu diterapkan dalam pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah responden sebanyak 5 informan. Analisis data menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan Menempuh 6 strategi dengan tingkat prioritas sebagai berikut (i) dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (ii) kerjasama dengan *stakeholder* (iii) peningkatan kesadaran (iv) penyediaan data dan teknologi (v) riset dan pengembangan (vi) penguatan kelembagaan petani. Melalui analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dapat diketahui bahwa strategi yang mendapat prioritas tertinggi dalam pengembangan asuransi pertanian adalah dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Kata kunci: *asuransi pertanian, strategi pengembangan, AHP*

## Abstract

This research was motivated by lack of farmer information regarding agricultural insurance. Farmers' trust in rice land does not necessarily experience crop failure. Farmers eventually become reluctant to pay premiums. These reasons become obstacles for farmers to participate in agricultural insurance programs. The objectives of this research (1) To identify criteria and alternative strategies in developing agricultural insurance in South Konawe Regency. (2) Analyze the priority alternative strategies that need to be implemented in developing agricultural insurance in South Konawe Regency. The number of respondents was 5 informants. Data analysis uses AHP (Analytical Hierarchy Process) method. The results of the research show that in developing agricultural insurance in South Konawe Regency, 6 strategies are used with the following priority levels (i) policy and budget support from local governments (ii) collaboration with stakeholders (iii) increasing awareness (iv) providing data and technology (v) research and development (vi) strengthening farmer institutions. Through AHP (Analytical Hierarchy Process) analysis, it can be seen that the strategy that has the highest priority in developing agricultural insurance is policy and budget support from the regional government of South Konawe Regency.

Keywords: *agricultural insurance, development strategy, AHP*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam menjalankan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Disisi lain, kesejahteraan para petani memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Sektor pertanian yang maju dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan mengentaskan kemiskinan (Zednita Azriani & Paloma, 2018). Sektor tanaman pangan khususnya padi sawah merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peranan strategis bangsa Indonesia karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia serta merupakan pendapatan bagi para petani (Zarliani, 2020); Saediman et al., 2019)

Namun demikian, secara teknis kegiatan usaha pertanian akan selalu dihadapkan pada resiko yang cukup tinggi meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global (Saediman et al., 2020; Saediman et al., 2021), disamping resiko tidak pastinya harga pasar. Penurunan produksi hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga dapat menyebabkan pendapatan petani menurun. Petani akan menderita kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak memiliki modal lagi (Thalia Malirisa Marphy, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi pertanian.

Asuransi pertanian dipandang sebagai salah satu alternatif instrument untuk menghadapi resiko ketidakpastian dimana petani dapat berbagi atau mentransfer risiko dan ketidakpastian yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi untuk mengatasi kerugian petani. Bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menyebutkan bahwa asuransi pertanian merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melindungi petani dari gagal panen. Yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang fasilitasi Asuransi Pertanian (Maria Ditha Ayu, Dame Trully Gultom, 2021)

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2013 yang dimaksud dengan asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengingatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani. Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usaha tani terjamin (Kementerian Pertanian 2016). Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi. Salah satu fasilitas tersebut adalah bantuan pembayaran premi sebesar 80%, sedangkan 20% sisanya menjadi tanggungan petani.

Padi sawah merupakan tanaman pangan utama di Provinsi Sulawesi Tenggara (Saediman, 2015). Salah satu daerah sentra produksi beras adalah Kabupaten Konawe Selatan, yang didukung oleh aspek luas lahan pertanian sawah untuk budidaya padi dan aspek sumberdaya pertanian yang potensial dalam mengembangkan sub sektor pertanian tanaman pangan padi. Luas lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Konawe Selatan sebesar 24.449 Ha dengan hasil produksi 82.800 ton (BPS Sulawesi Tenggara, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut penetapan strategi pengembangan akan berperan cukup besar terhadap perkembangan asuransi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk membantu dalam pemilihan alternatif strategi pengembangan yang tepat.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa banyak petani Kabupaten Konawe Selatan telah lama melaksanakan program asuransi pertanian.

Pada penerapan metode AHP yang diutamakan adalah kualitas dari responden, dan tidak tergantung pada kuantitasnya (Saaty, 1993). Oleh karena itu penilaian AHP memerlukan pakar sebagai responden ahli atau narasumber. Responden untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dilakukan sengaja (purposive), yaitu sampel yang ditentukan dengan pertimbangan tertentu dimana dipilih orang-orang yang ahli terkait strategi pengembangan asuransi pertanian. Adapun responden ahli dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Responden Ahli

No	Responden Ahli
1.	PT Jasindo
2.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan
3.	Kepala BPP Kecamatan Konda
4.	Kepala BPP Kecamatan Laeya
5	Peneliti

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, Variabel yang dimaksudkan adalah sejumlah kriteria yaitu anggaran, efektivitas, kesesuaian dengan visi misi pemda, ketersediaan sumberdaya, dampak. Serta sejumlah alternatif yaitu peningkatan kesadaran, kerja sama dengan stakeholder, dukungan kebijakan dan anggaran dari pemda, penyediaan data dan teknologi, riset dan pengembangan, penguatan kelembagaan petani

Adapun analisis yang digunakan adalah dengan AHP Analytical Hierarchy Process adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menentukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu. AHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

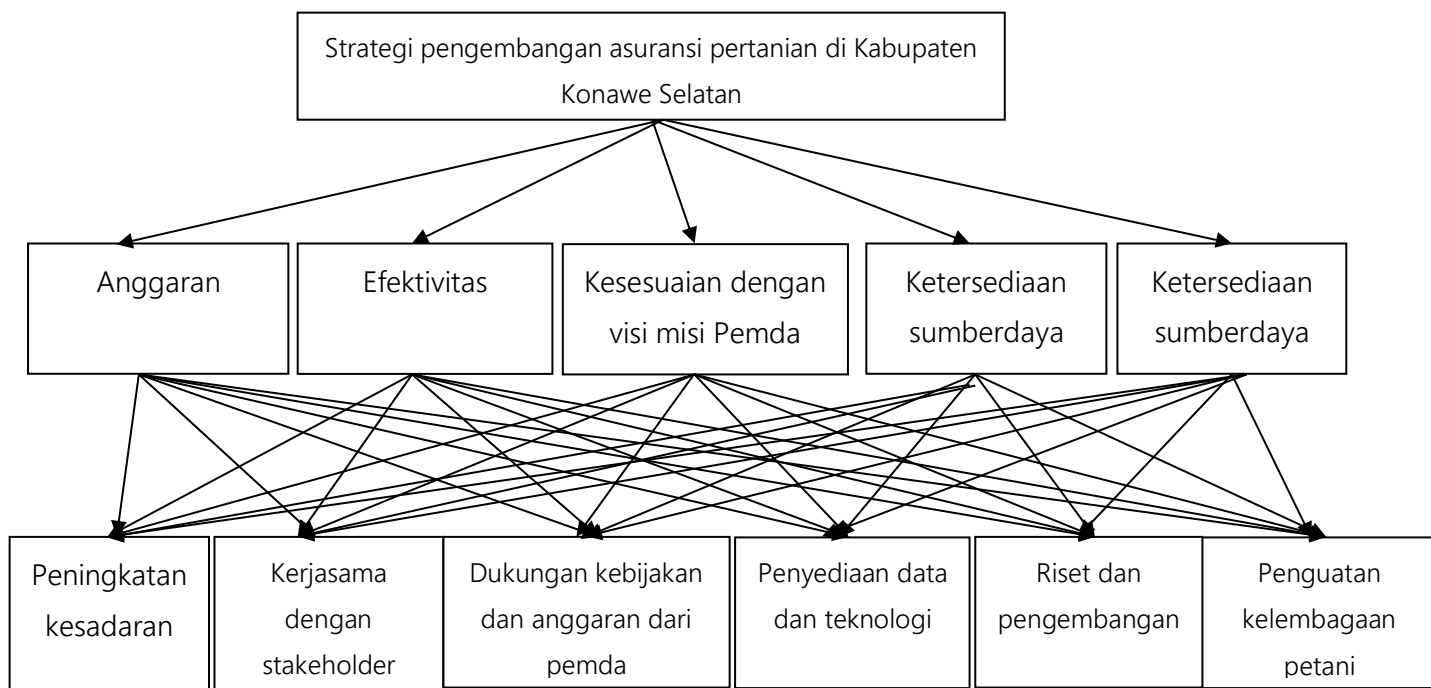
### *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Adapun tahapan analisis AHP pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *Decomposition*

Tahap *decomposition* adalah tahap menentukan tujuan yang ingin dicapai, kriteria yang digunakan dan apa saja alternatif yang tersedia. Penentuan tujuan pada analisis AHP berdasarkan hal yang ingin penulis capai pada tujuan penelitian yaitu menentukan prioritas strategi yang perlu diambil pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk pengembangan asuransi pertanian. Penentuan kriteria dan alternatif AHP berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden dan studi literature. Adapun tujuan, kriteria dan

alternatif yang telah diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Hierarki AHP Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa ada lima kriteria yang dibandingkan yaitu anggaran, efektivitas, kesesuaian dengan visi misi pemda, ketersediaan sumberdaya, dampak. Sedangkan alternatif yang dibandingkan yaitu (i) peningkatan kesadaran, (ii) kerjasama dengan stakeholder, (iii) dukungan kebijakan dan anggaran dari pemda, (iv) penyediaan data dan teknologi, (v) riset dan pengembangan, (vi) penguatan kelembagaan petani.

#### Penentuan prioritas alternatif

Setelah memperoleh nilai rata-rata perbandingan berpasangan setiap elemen, kemudian berdasarkan nilai rata-rata perbandingan berpasangan tersebut ditentukan prioritas dan alternatif dengan bantuan excel. Setelah nilai rata-rata perbandingan berpasangan diolah, data dianggap valid dan dapat diterima apabila nilai *inconsistency* menunjukkan angka dibawah 0,1.

penentuan prioritas alternatif berdasarkan kriteria anggaran

Tabel 4.11. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Anggaran

Kriteria	Alternatif	Perbandingan Faktor
Anggaran	Peningkatan Kesadaran	0,121
	Kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	0,187
	Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda	0,337
	Penyediaan Data dan Teknologi	0,163
	Riset dan pengembangan	0,107
	Penguatan Kelembagaan Petani	0,083

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria anggaran adalah dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (dengan bobot 0,337), kerjasama dengan *stakeholder* (dengan bobot 0.187), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,163), peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,121), riset dan pengembangan (dengan bobot 0,107), dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,083), dengan nilai *inconsistency* sebesar 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah berdasarkan kriteria ketersediaan anggaran merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4. 12. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Efektivitas

Kriteria	Alternatif	Perbandingan Faktor
Efektivitas	Peningkatan Kesadaran	0,229
	Kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	0,203
	Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda	0,221
	Penyediaan Data dan Teknologi	0,183
	Riset dan pengembangan	0,072
	Penguatan Kelembagaan Petani	0,089

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria efektivitas adalah peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,229), dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (dengan bobot 0,221), kerjasama dengan *stakeholder* (dengan bobot 0,203), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,183), penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,089) dan riset dan pengembangan (dengan bobot 0,072) dengan nilai *inconsistency* sebesar 0,02. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif peningkatan kesadaran berdasarkan kriteria efektivitas merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4.13. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Kesesuaian dengan visi Misi Kabupaten Konawe Selatan

Kriteria	Alternatif	Perbandingan Faktor
Kesesuaian dengan visi misi Kabupaten Konawe Selatan	Peningkatan Kesadaran	0,126
	Kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	0,144
	Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda	0,395
	Penyediaan Data dan Teknologi	0,158
	Riset dan pengembangan	0,083
	Penguatan Kelembagaan Petani	0,091

Berdasarkan Tabel 4.13. dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria kesesuaian dengan visi misi Kabupaten Konawe Selatan yang paling penting adalah dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (dengan bobot 0,395), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,158), kerjasama dengan *stakeholder* (dengan bobot 0,144), peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,126), penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,09) dan riset dan pengembangan (dengan bobot 0,083). Dengan nilai *inconsistency* 0,04 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah berdasarkan kriteria kesesuaian dengan visi misi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4.14. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Ketersediaan Sumberdaya

Kriteria	Alternatif	Perbandingan Faktor
Ketersediaan sumberdaya	Peningkatan Kesadaran	0,129
	Kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	0,205
	Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda	0,355
	Penyediaan Data dan Teknologi	0,144
	Riset dan pengembangan	0,091
	Penguatan Kelembagaan Petani	0,073

Berdasarkan Tabel 4.14. dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria ketersediaan sumberdaya adalah dukungan kebijakan dan anggaran dari pemda (dengan bobot 0,355), kerjasama dengan *stakeholder* (dengan bobot 0,205) penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,144), peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,129), riset dan pengembangan (dengan bobot 0,091) dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,73). Dengan nilai *inconsistency* 0,02. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif dukungan kebijakan dan anggaran dari pemda berdasarkan kriteria ketersediaan sumberdaya merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4.15. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Dampak

Kriteria	Alternatif	Perbandingan Faktor
Dampak	Peningkatan Kesadaran	0,262
	Kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	0,211
	Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda	0,197
	Penyediaan Data dan Teknologi	0,151
	Riset dan pengembangan	0,100
	Penguatan Kelembagaan Petani	0,075

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas berdasarkan kriteria dampak yang paling penting adalah peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,262),

kerjasama dengan *stakeholder* (dengan bobot 0,211), dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (dengan bobot 0,197), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,151), riset dan pengembangan (dengan bobot 0,100) dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,075). Dengan nilai *inconsistency* sebesar 0,04. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif peningkatan kesadaran berdasarkan kriteria dampak merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4.16. Nilai Bobot Alternatif Berdasarkan Seluruh Kriteria

Alternatif	Rangking	
Peningkatan Kesadaran	0,173	III
Kerjasama dengan <i>Stakeholder</i>	0,190	II
Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemda	0,301	I
Penyediaan Data dan Teknologi	0,160	IV
Riset dan Pengembangan	0,090	V
Penguatan Kelembagaan Petani	0,082	VI

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa urutan alternatif prioritas adalah dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah (dengan bobot 0,301), peningkatan kesadaran (dengan bobot 0,173), kerjasama dengan *stakeholder* (dengann bobot 0,190), penyediaan data dan teknologi (dengan bobot 0,160), riset dan pengembangan (dengan bobot 0,090) dan penguatan kelembagaan petani (dengan bobot 0,082). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif strategi dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan alternatif prioritas dalam strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pengembangan asuransi pertanian di Kabupaten Konawe Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Ada lima kriteria dalam pengembangan asuransi pertanian dengan urutan prioritas sebagai berikut (i) anggaran, (ii) efektivitas, (iii) kesesuaian dengan visi misi pemda, (iv) ketersediaan sumberdaya, (v) dampak. Ada enam alternatif strategi dalam pengembangan asuransi

pertanian dengan urutan prioritas sebagai berikut (i) dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah, (ii) kerjasama dengan *stakeholder*, (iii) peningkatan kesadaran, (iv) penyediaan data dan teknologi, (v) riset dan pengembangan, dan (vi) penguatan kelembagaan petani. melalui analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dapat diketahui bahwa strategi yang mendapat prioritas tertinggi dalam pengembangan asuransi pertanian adalah dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- H. Saediman, M. A. Limi, Y. Indarsyih, S. Abdullah, and W. O. Yusria, "Rice farmers' adaptation practices to climate change: a case of Konda subdistrict in Southeast Sulawesi," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 724, p. 012102, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/724/1/012102.
- H. Saediman, L. O. Lasmin, M. A. Limi, U. Rianse, and L. Geo, "Rice Farmers' Perception of Climate Variability in South Konawe District of Southeast Sulawesi," *Int. J. Sci. Technol. Res.*, vol. 9, no. 2, pp. 3128–3132, 2020.
- H. Saediman, A. Amini, R. Basiru, and L. O. Nafiu, "Profitability and Value Addition in Cassava Processing in Buton District of Southeast Sulawesi Province, Indonesia," *J. Sustain. Dev.*, vol. 8, no. 1, pp. 226–234, 2015b, doi: 10.5539/jsd.v8n1p226.
- H. Saediman, S. Aisa, M. Zani, M. A. Limi, and W. O. Yusria, "Food Security Status of Households in a Cassava-Growing Village in Southeast Sulawesi, Indonesia," *J. Agric. Ext.*, vol. 23, no. 1, pp. 199–209, Jan. 2019, doi: 10.4314/jae.v23i1.17.
- H. Saediman, M. A. Limi, and Y. Indarsyih, "Aplikasi SWOT-AHP Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Komoditas Padi Sawah di Provinsi Sulawesi Tenggara," in *Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan*, H. Siregar, A. M. Padangaran, and W. Widayati, Eds., Kendari: Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UHO, 2015a, pp. 416–426.
- Maria Ditha Ayu, Dame Trully Gultom, S. G. (2021). Keikutsertaan Program Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP ) di Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Participation of the Rice Farming Insurance Program ( AUTP ) in Tulung Agung Village Gadingrejo District Pringsewu Regency dalam perekon. *Jurnal Komunikasi Dan Penyuluhan Pertanian*, 2(2), 65–76.
- Thalia Malirisa Marphy, D. N. P. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi ( AUTP ) di Desa Watugede , Kecamatan Singosari , Kabupaten Malang. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 30(2), 62–70.

<https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.2.8>

Zarliani, W. O. Al. (2020). Pengaruh Faktor-faktor Produksi Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah di Kelurahan Ngkari-Ngkari Kecamatan Bungi Kota Baubau. *Jurnal Sang Pencerah*, 6(2).

Zednita Azriani, R., & Paloma, C. (2018). Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Padang. *Universitas Sebelas Maret*, 2(1), 36–43.